

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada dasarnya ialah sebuah rangkaian upaya yang dilakukan oleh suatu negara ataupun daerah yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang dan berkelanjutan serta mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ini menjadi hal yang begitu penting dan juga bersifat multidimensial yang berdasar pada perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap atau perilaku hidup masyarakat serta perubahan kelembagaan nasional (Arifin, 2012). Tujuan dari pembangunan ekonomi yang dilakukan yakni untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu mengentaskan kemiskinan, pengangguran, menjaga kestabilan harga, menyeimbangkan neraca pembayaran dan meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu indikator yang bisa mengukur bahwa suatu pembangunan ekonomi berhasil dilakukan yakni jika pembangunan tersebut mampu meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi.

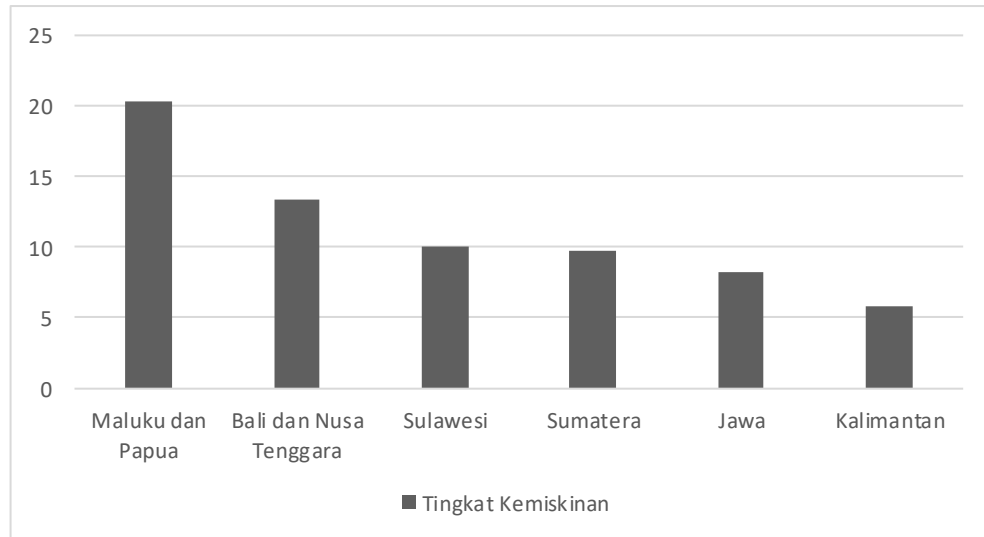
Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara. Dalam kaca mata pembangunan, kemiskinan menjadi hambatan yang bisa menghalangi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan juga bisa memicu berbagai permasalahan dan kejahatan sosial di masyarakat sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan. Kemiskinan ini dibahas dalam Q.S Ar-Rum:38 sebagai berikut:

فَاتِ دَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (LPMQ, 2021)

Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang kesulitan untuk memenuhi tingkat minimum kesejahteraan ekonomi dan tidak memiliki sarana dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar (Adedokun & Adeyemo, 2008). Kebutuhan dasar yang dimaksud ialah kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan rekreasi (Illiyasu & Hamidu, 2006). Menurut *The National Teachers' Institute* (2008), kemiskinan didefinisikan sebagai berbagai situasi ekonomi di mana individu tidak mampu mengatasi kondisi hidup dalam masyarakat dalam hal makan, tempat tinggal, pakaian dan pendidikan. Kemiskinan ini menjadi masalah multidimensi yang berkaitan dengan beberapa faktor ekonomi, fisik, psikologi dan sosial budaya. Penyebab kemiskinan akan mengarah pada teori lingkaran setan kemiskinan. Keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah akan menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan menyebabkan rendahnya tabungan. Rendahnya tabungan akan menyebabkan rendahnya investasi (Kuncoro, 2006).

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia, bahkan menjadi masalah umum yang selalu dihadapi setiap tahunnya. Berikut ini adalah persentase tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia berdasarkan pulau pada tahun 2019:



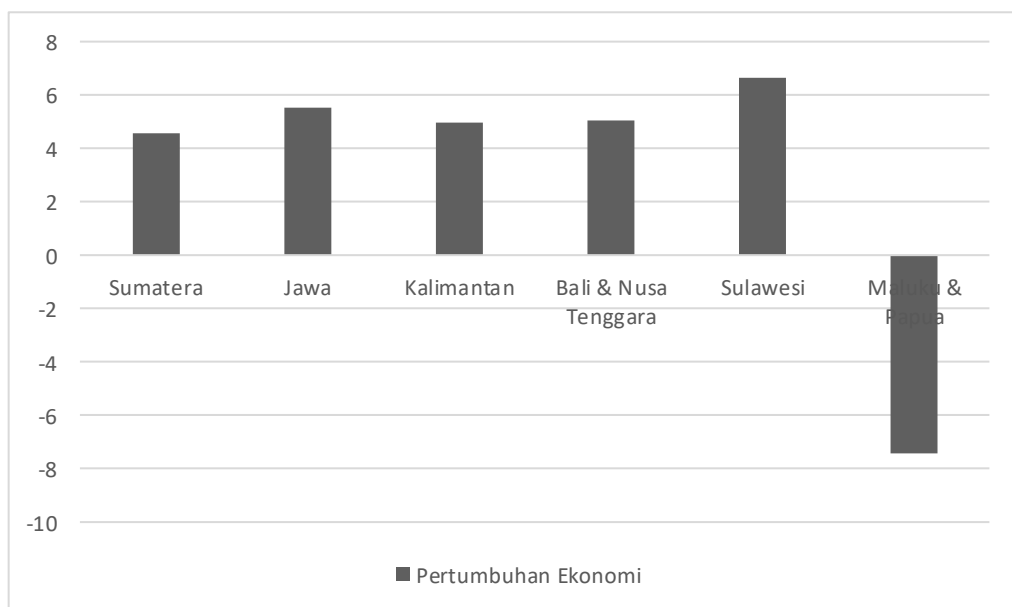
Sumber: Badan Pusat Statistik & Databoks Katadata (2020)

Gambar 1.1
Grafik Tingkat Kemiskinan di Indonesia
berdasarkan Pulau tahun 2019

Berdasarkan gambar 1.1 menjelaskan bahwa persentase tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia tahun 2019 terbesar terjadi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 20,39%. Disusul oleh Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,36%, kemudian Pulau Sulawesi sebesar 10,07%. Selanjutnya Pulau Sumatera dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,82%, lalu disusul oleh Pulau Jawa sebesar 8,29% dan Pulau Kalimantan sebesar 5,81%.

Pulau Jawa sebagai salah satu pulau terpadat di dunia mencetak tingkat kemiskinan yang cukup rendah, mengingat bahwa Pulau Jawa sendiri

merupakan sentral perekonomian Indonesia dan memiliki pengaruh yang kuat dalam perekonomian. Hal ini menjadi lebih menarik juga karena salah satu cara yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan yakni melalui pertumbuhan ekonomi. Berdasar pada data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi ekonomi yang terjadi di Pulau Jawa tahun 2019 cukup baik dan dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik & Databoks Katadata (2020)

Gambar 1.2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
berdasarkan Pulau tahun 2019

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,65% di tahun 2019. Selanjutnya Pulau Jawa sebesar 5,52%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,07%, Pulau Kalimantan sebesar 4,99% dan Pulau Sumatera sebesar 4,57%. Namun pertumbuhan ekonomi Pulau Maluku dan Papua mengalami penurunan hingga mencapai -7,40%.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Pulau Jawa sebesar 5,52% dan tingkat kemiskinannya yang cenderung rendah mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor dalam pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi ialah indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dan juga menentukan adanya langkah atau kebijakan pembangunan selanjutnya (Mankiw, 2007). Latar belakang dari pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan yakni berdasar pada hipotesis *trickle down effect*. Gagasan utama pada hipotesis ini ialah keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi saja mampu mengentaskan kemiskinan. Menurut konsep ini dijelaskan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi akan dirasakan dahulu oleh orang-orang kaya dan pada akhirnya manfaat tersebut akan mengalir ke masyarakat miskin (Kakwani & Pernia., 2000).

Dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi akan lebih efektif jika disertai juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan (Kakwani, N. & Son, 2008; Kakwani, N., 2010). Maksud dari pernyataan tersebut bahwa jika pertumbuhan ekonomi diikuti oleh pemerataan pendapatan, maka dapat diasumsikan masyarakat miskin akan memperoleh pendapatan yang lebih besar dari biasanya. Dengan demikian masyarakat miskin akan keluar dari zona kemiskinan dan juga kesejahteraannya meningkat.

Keberhasilan atau kegagalan dalam pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat dapat dilihat melalui indeks gini atau rasio gini suatu wilayah. Gini

ratio ialah ukuran ketimpangan agregat yang digunakan untuk melihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi pada suatu distribusi baik pengeluaran, pendapatan, dan lain sebagainya.

Faktor lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan yakni indeks pembangunan manusia. IPM ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia suatu wilayah yang juga pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Indeks pembangunan manusia dibentuk melalui tiga dimensi dasar, meliputi umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak.

Di sisi lain, pengentasan kemiskinan bisa dipengaruhi oleh adanya kegiatan investasi. Hal ini karena kegiatan investasi akan berimbas pada peningkatan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan kemakmuran rakyat serta mengurangi kemiskinan. Investasi ini menjadi salah satu penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Pengurangan kemiskinan juga dipengaruhi oleh jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan. Setiap tahunnya jumlah pengeluaran pemerintah terus naik dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan. Ketepatan sasaran pengeluaran pemerintah juga berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, sehingga pengeluaran pemerintah menjadi salah satu alat intervensi yang efektif dalam perekonomian.

Salah satu indikator perekonomian lainnya yang tidak kalah penting yakni inflasi. Menurut Boediono (2001:161) inflasi merupakan kecenderungan

dari harga yang naik secara umum dan terus menerus dalam satu periode tertentu. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian, dan juga berpengaruh pada kemiskinan. Dalam hal ini jika terjadi peningkatan tingkat inflasi maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena melambungnya harga kebutuhan yang dibutuhkan. Hal ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, lalu secara riil juga pendapatan yang didapat akan mengalami penurunan sehingga menimbulkan kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk membahas masalah kemiskinan di Pulau Jawa dan beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, seperti IPM, rasio gini, investasi, inflasi dan pengeluaran pemerintah serta bagaimana pengaruhnya dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel interveningnya.

B. Batasan Masalah

Ruang lingkup dari penelitian ini berdasar pada latar belakang yang telah dipaparkan antara lain:

1. Variabel dependen pada penelitian ini ialah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
2. Variabel independen pada penelitian ini ialah IPM, rasio gini, investasi, inflasi dan pengeluaran pemerintah.
3. Variabel intervening pada penelitian ini ialah pertumbuhan ekonomi.
4. Data yang digunakan yakni data 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2010 sampai 2019.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yang berdasar pada latar belakang dan batasan masalah yang ada antara lain:

1. Bagaimana pengaruh variabel IPM, investasi, inflasi, pengeluaran pemerintah dan rasio gini terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh variabel IPM, inflasi, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan rasio gini terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh variabel IPM, investasi, rasio gini, inflasi, pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa melalui pertumbuhan ekonomi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang berdasar pada rumusan masalah yang telah dipaparkan antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel IPM, investasi, inflasi, pengeluaran pemerintah dan rasio gini terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel IPM, inflasi, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan rasio gini terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel IPM, investasi, rasio gini, inflasi, pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa melalui pertumbuhan ekonomi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam merumuskan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan di Pulau Jawa.
2. Dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi peneliti lain yang mungkin akan mengembangkan penelitian di ruang lingkup yang sama.
3. Dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan memperluas wawasan mengenai pengaruh variabel indeks pembangunan manusia, rasio gini, investasi, inflasi, pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa melalui pertumbuhan ekonomi.